KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : BURT bantah bangun apartemen
Tanggal : Senin, 21 Agustus 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

BURT Bantah Bangun Apartemen

● ALI MANSUR, SANTI SOPIA

JAKARTA — Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR membantah berencana untuk membangun apartemen untuk anggota. Ketua BURT Anthon Sihombing berdalih, tidak ada rencana membangun apartemen DPR dalam program kerjanya. BURT hanya merencanakan pembangunan gedung untuk mendukung kerja dewan.

Menurut Anthon, saat ini kondisi Gedung Nusantara I, kantor anggota dewan, dinilai sudah tidak layak. Sebab, ruangan anggota dewan sudah sangat sempit untuk menampung sekitar 560 anggota dewan beserta stafnya.

"Kita *gak* pernah bicara apartemen. Yang kita rencanakan adalah pembangunan gedung untuk kerja pengganti Gedung Nusantara I karena sudah tidak layak," ujar Anthon, dalam siaran pers yang diterima *Republika*, Sabtu (19/8).

Anthon menjelaskan, Gedung Nusantara I sudah tidak layak karena over kapasitas. Gedung itu dinilai sudah tidak mampu menampung jumlah staf anggota dewan. Setiap anggota dewan memiliki staf yang berjumlah tujuh orang sebagai pendukung pekerjaan. Jumlah ini meningkat dibandingkan beberapa periode lalu yang hanya sekitar tiga atau lima staf.

BURT mengakui sudah merencanakan pembangunan gedung untuk menambah kapasitas tampung. Anthon mengatakan, anggaran yang direncanakan sekitar Rp 320 miliar untuk pembangunan gedung. Sedangkan untuk memulai mega proyek parlemen akan dikucurkan dana sekitar Rp 280 miliar untuk pembangunan alun-alun demokrasi. Anthon kembali menegaskan, BURT dan DPR tidak berencana membangun apartemen untuk anggota dewan. "Yang saya bilang adalah Gedung Nusantara I sudah over kapasitas, saya tidak pernah bicarakan rencana apartemen DPR," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman meminta masyarakat memahami bahwa perluasan gedung bagi anggota dewan adalah keniscayaan, salah satunya karena over kapasitas. Dahulu, kata dia, gedung tersebut dibangun untuk sekitar 800 orang dan sekarang sudah ada kurang lebih 5.000 orang lalu lalang di gedung parlemen.

"Sekarang anggota dewan *nambah*. Satu anggota dengan tenaga ahli dan lain-lainnya ada tujuh orang. Logika umumnya, memang diperlukan perluasan," kata Sohibul di Jakarta, Jumat (18/8).

Terpisah, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD khawatir rencana proyek pembangunan gedung baru dan apartemen anggota DPR RI berakhir seperti proyek KTP elektronik (KTP-el). Proyek gedung baru DPR dinilai seperti mencari-cari proyek. "Menurut saya, terkesan mencari-cari proyek, saya khawatir nanti seperti KTP-el lagi," kata Mahfud. ■ antara ed: agus raharjo